

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Selain itu, berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas.

Menurut Charles, T Horngren (2011:3) yang dialihbahasakan oleh Gina Gania, akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses dana menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Menurut Warren dkk (2011:9) yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian, akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Menurut Wild dan Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internak dan eksternal.”

Akuntansi menyediakan informasi yang handal, relevan dan tepat waktu kepada para manajer, serta kreditor sehingga sumber daya dapat dialokasikan ke perusahaan yang paling efisien. Akuntansi juga menyediakan ukuran efisiensi (profitabilitas) dan kesehatan keuangan perusahaan (Kieso dkk, 2013: 21) dialihbahasakan oleh Emil Salim.

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi yang dikemukakan di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi merupakan proses penggolongan, pengikhtisaran, dan pencatatan atas transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan untuk membuat pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

2.1.1.2 Definisi Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso, dkk (2013:2) dialihbahasakan oleh Emil Salim, akuntansi keuangan (*financial accounting*) yaitu:

“Akuntansi keuangan merupakan sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.”

Menurut Mamduh Hanafi (2009:29), definisi akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai internal.”

Berdasarkan definisi di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa akuntansi keuangan menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala dimana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi telah secara eksentif digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan secara sukarela oleh organisasi (Pellegrino dan Lodhia, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian O'Donovan (2002) yang menjelaskan pengungkapan lingkungan oleh suatu organisasi. Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi, yang telah didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas adalah bagian. Ketika terdapat perbedaan aktual dan potensial, antara dua sistem nilai, ada ancaman terhadap legitimasi entitas (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam O'Donovan, 2002).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dan komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Yang melandasi teori legitimasi adalah

“kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dowling dan Pfeffer dalam Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan (p.131):

“Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.”

Pada paragraf 122:

“Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi akan terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka dianggap beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi (Deegan dan Unerman, 2011).

Berdasarkan teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa legitimasi merupakan suatu bentuk keselarasan antara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan aktivitas perusahaan. Ketika legitimasi diperoleh, maka perusahaan dapat terus melanjutkan operasinya karena entitas telah memperhatikan norma yang berlaku serta keadaan masyarakat dan

lingkungan sekitarnya. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini.

2.1.3 Teori *Stakeholder*

Konsep *stakeholder* pertama kali dikembangkan oleh Freeman. Menurut Freeman (1983:91) dalam Veithzal Rivai, dkk (2011:51) *stakeholder* dalam arti luas adalah:

“Kelompok maupun individu-individu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Yang dimaksud ke dalam *stakeholder* mencakup: kelompok kepentingan publik, kelompok yang melakukan aktivitas protes (*protest group*), pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja dan juga karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, dan pemegang saham.”

Gray Kouhi dan Adams (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Semakin *powerful stakeholder*, semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.”

Dalam perspektif teori *stakeholder*, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholder* memiliki hak untuk diberikan informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi mereka meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan, atau tidak memainkan peranan signifikan dalam perusahaan (Purnomosidhi, 2006). *Stakeholder* memiliki kemampuan untuk mengendalikan

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan pengungkapan. (Ghomi dan Leung, 2013).

Berdasarkan teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa teori *stakeholder* berfokus pada cara-cara mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholdernya*. Pengungkapan sosial lingkungan merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dan *stakeholdernya*.

2.1.4 Regulator (Pemerintah)

2.1.4.1 Definisi Regulator (Pemerintah)

Kehadiran pemerintah dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya. (S.H. Sarundajang, 2002:5) dalam Yusuf (2014).

Menurut Bagir Manan (2001:101) dalam Yusuf (2014) bahwa:

“Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Menurut Mardinan (2012) bahwa:

“Regulator adalah pemangku jabatan dalam pemerintahan yang berwenang membuat kebijakan dan peraturan untuk kepentingan bersama baik masyarakat maupun negara.”

Berdasarkan teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa regulator adalah pemangku jabatan dalam pemerintahan yang berwenang membuat rumusan mengenai aturan-aturan dan kebijakan yang disahkan secara hukum agar dapat mengatur masyarakatnya untuk kepentingan bersama baik masyarakat maupun negara.

2.1.4.2 Fungsi Regulator (Pemerintah)

Menurut Labolo (2010: 39) bahwa:

“Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri”.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Untuk mengemban tugas negara menurut Hum (2010:36), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. “Fungsi Primer atau fungsi pelayanan sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk pembangunan sarana dan prasarana.”

Menurut Labolo (2010:32) peran pemerintahan antara lain:

1. “Pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai dinamisator
Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Pemerintah sebagai fasilitator
Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau pemodalannya kepada masyarakat.”

2.1.4.3 Metode Pengukuran Regulator (Pemerintah)

Dalam penelitian ini, variabel regulator (pemerintah) ini diukur dengan variabel *dummy* untuk membedakan antara perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan perusahaan swasta. Perusahaan BUMN diberi kode 1 dan perusahaan swasta diberi kode 0.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

2.1.5.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Ardiansyah (2014) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain.”

Menurut Wahyu Widarjo, (2010:25) kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, dan asing.”

Menurut Ayoib Che Ahmad (2014), kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“The role of institutional ownership in economy is a debatable subject. As one of the owners of companies, institutional shareholders have certain rights, including the right to elect the board of directors. The board has the responsibility to monitor corporate managers and their performance. If institutional shareholders are dissatisfied with the company performance they will choose either to sell their shares, hold their shares and voice their dissatisfaction or hold their shares and do nothing.”

Menurut Riska dan Ratih (2009) definisi kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan Institusional yaitu proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan.”

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase.”

Menurut Nuraina (2012:116) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain.”

Dari definisi kepemilikan institusional di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan serta bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

2.1.5.2 Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah kepemilikan saham institusional dengan jumlah saham beredar akhir tahun untuk mengetahui besarnya kepemilikan institusional antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta.

Menurut Ardiansyah (2014), rumus kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah saham beredar akhir tahun}} \times 100\%$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) bahwa:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat Mengklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*), penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total *asset* perusahaan.”

Menurut Brigham & Houston (2010:4) pengertian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Bambang Riyanto (2011:313), definisi ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan.”

Ukuran perusahaan menurut Niresh & Velnampy (2014) adalah sebagai berikut:

“The amount and variety of production capacity or the amount and variety of services a firm can provide concurrently to its customers.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka sampai pada pemahaman penulis bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah dan keragaman hasil produksi, jumlah dan keragaman jasa, nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.1.6.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu:

- a. usaha mikro;
- b. usaha kecil;
- c. usaha menengah; dan
- d.usaha besar.”

Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun

2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional

milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	<i>Assets</i> (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta - 10 M	2,5 M - 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Dari pengungkapan kriteria pengklasifikasian ukuran perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas *asset* dan omset penjualan yang dimiliki sebuah perusahaan.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan

Harahap (2007:23) menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (\ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) pengukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva.”

Adapun rumus perhitungan ukuran perusahaan menurut Jogiyanto (2013:282) adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Aktiva}$$

Sedangkan menurut Niresh dalam Rosyeni Rasyid (2014), ukuran perusahaan dapat diukur dengan total penjualan. Sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan memengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{ Total Penjualan}$$

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Penggunaan logaritma natural pada penelitian ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengurangi nilai asal.

2.1.7 Profitabilitas

2.1.7.1 Definisi Profitabilitas

Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan.

Pengertian profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi (2012:81):

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).”

Menurut Kasmir (2015:114) mengatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Sudana (2011:22) bahwa:

“*Profitability ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

Menurut Sartono (2012:122) bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Irham Fahmi (2014: 135) sebagai berikut:

“Profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.”

Dari beberapa pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuangan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, dan jumlah modal sendiri yang dimiliki perusahaan tersebut.

2.1.7.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197):

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

2.1.7.3 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.7.4 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Irham Fahmi (2014: 135) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas di antaranya:

1. *Gross Profit Margin.*
2. *Net Profit Margin.*
3. *Return On Equity.*
4. *Return On Investment.*”

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio ini menggambarkan presentase dari laba atau kegiatan usaha yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya personil, biaya kantor dan biaya overhead lainnya.

Menurut Irham Fahmi (2014:136) *gross profit margin* sebagai berikut:

“Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.”

Perhitungan *gross profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

(Irham Fahmi, 2014:136)

2. *Net Profit Margin*

Untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan.

Menurut Irham Fahmi (2014:136) *net profit margin* sebagai berikut:

“Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan, menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus.”

Perhitungan *net profit margin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

(Irham Fahmi, 2014:136)

3. *Return On Equity*

Bagi para pemilik/ pemegang saham bank yang bersangkutan maka rasio ini mempunyai arti yang sangat penting untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola *capital* yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.

Menurut Irham Fahmi (2014:137) *return on equity* sebagai berikut:

“Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.”

Perhitungan *return on equity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Stakeholder's Equity}}$$

(Irham Fahmi, 2014:137)

4. *Return on Investment*

Menurut Irham Fahmi (2014:137) sebagai berikut:

“*Return On Investment* adalah pengembalian investasi atau ditulis juga dengan *return on asset* (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang diharapkan.”

Perhitungan *return on investment* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Asset}}$$

(Irham Fahmi, 2014:137)

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Investment* atau yang sering disebut *Return On Asset* (ROA) karena ROA menggambarkan karakteristik teknis terkait dengan efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya.

2.1.8 *Carbon Emission Disclosure*

2.1.8.1 *Definisi Carbon Emission*

Emisi gas karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke lapisan atmosfer bumi sehingga menyebabkan terbentuknya emisi gas rumah kaca (Riebek, 2010). Pelepasan terjadi karena adanya proses pembakaran terhadap karbon baik dalam bentuk tunggal maupun

senyawa. Menurut kementerian Lingkungan Hidup (2012) Gas-gas ini dapat berbentuk CO₂, CH₄, N₂O, HFC, dan sebagainya.

Emisi CO₂ dari waktu ke waktu terus meningkat baik pada tingkat global, regional, nasional pada suatu negara maupun lokal untuk suatu kawasan. Hal ini terjadi karena semakin besarnya penggunaan energi dari bahan organik (fosil), perubahan tataguna lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik (Slamet S, Peneliti Lapan) dalam Jannah (2014).

Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasional dari perusahaan. Perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka yang berperan terhadap peningkatan perubahan iklim salah satunya *carbon emission disclosure* (Jannah, 2014).

Sampai pada pemahaman penulis bahwa emisi karbon adalah gas-gas buangan yang mengandung karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia baik dari rumah tangga maupun aktivitas operasional perusahaan. Jika jumlah gas buangan tersebut meningkat maka akan berdampak serius terhadap pemanasan suhu bumi yang lebih lanjut menyebabkan penipisan lapisan ozon.

2.1.8.2 Definisi *Carbon Emission Disclosure*

Menurut Tri Cahya (2016) bahwa:

“*Carbon Emission Disclosure* adalah pengungkapan untuk menilai emisi karbon sebuah organisasi dan menetapkan target untuk pengurangan emisi tersebut.”

Pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*) oleh perusahaan meningkat beberapa tahun terakhir dan umumnya masih disajikan secara sukarela (*voluntary disclosure*) dengan tujuan untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal perusahaan (Andrew dan Cortese, 2012).

Secara umum, perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya jika informasi itu dapat merugikan posisi atau reputasi perusahaan maka perusahaan akan menahan informasi tersebut.

PSAK No. 1 (revisi 2009) paragraf dua belas menyatakan bahwa:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Carbon Emission Disclosure merupakan salah satu contoh dari pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang telah dinyatakan dalam PSAK tersebut. Pengungkapan lingkungan mencakup intensitas GHG *emission* atau gas rumah kaca dan penggunaan energi, dan strategi dalam kaitannya dengan perubahan iklim, kinerja terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca, risiko dan peluang terkait dampak perubahan iklim (Jannah, 2014).

Sampai pada pemahaman penulis bahwa *carbon emission disclosure* adalah salah satu pengungkapan lingkungan secara sukarela oleh perusahaan yang

mengungkap data-data mengenai emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas operasional perusahaan.

2.1.8.3 Metode Pengukuran *Carbon Emission Disclosure*

Dalam penelitian ini, *Carbon Emission Disclosure* diukur dengan menggunakan beberapa item yang dikembangkan dari penelitian Choi et al., (2013). Choi et al menentukan lima kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon yaitu: perubahan iklim (*CC/Climate Change*), emisi gas rumah kaca (*GHG/Greenhouse Gas*), konsumsi energy (*EC/ Energy Consumption*), pengurangan gas rumah kaca (*RC/Reduction and Cost*), serta akuntabilitas emisi karbon (*AEC/ Accountability of Emission Carbon*). Dalam lima kategori tersebut, 18 item yang disajikan. Berikut disajikan tabel 2.2 mengenai indeks pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2

Carbon Emission Disclosure Index

Kategori	Item
1. Perubahan iklim : risiko dan peluang	<p>CC1 – Penilaian/ deskripsi dari risiko yang berhubungan dengan perubahan iklim dan aksi yang dilakukan atau aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko</p> <p>CC2 – Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, implikasi bisnis, dan peluang dari perubahan iklim</p>

2. Penghitungan emisi GRK	<p>GHG1 – Deskripsi tentang metodologi yang digunakan untuk mengkalkulasi (menghitung) emisi GRK (gas rumah Kaca)</p> <p>GHG2 – keberadaan verifikasi dari pihak eksternal dalam mengukur jumlah emisi GRK</p> <p>GHG3 – total emisi GRK yang dihasilkan</p> <p>GHG4 – pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau lingkup 3 emisi GRK</p> <p>GHG5 – pengungkapan sumber emisi GRK</p> <p>GHG6 – pengungkapan fasilitas atau segmen dari GRK</p> <p>GHG7 – Perbandingan emisi GRK dengan tahun sebelumnya</p>
3. Konsumsi Energi	<p>EC1 - total energi yang dikonsumsi</p> <p>EC2 - kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber terbarukan</p> <p>EC3 - pengungkapan menurut tipe, fasilitas atau segmen</p>
4. Biaya dan pengurangan GHG	<p>RC1 - rencana atau strategi detail untuk mengurangi emisi GRK</p> <p>RC2 - spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun untuk mengurangi emisi GRK</p> <p>RC3 - Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon</p> <p>RC4 - biaya dari Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (capital expenditure planning)</p>
5. Akuntabilitas Emisi Karbon	<p>AEC1 – indikasi dari dewan komite yang bertanggungjawab atas tindakan yang berhubungan dengan perubahan iklim</p> <p>AEC2 – deskripsi dari mekanisme dimana dewan meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim</p>

Sumber: Choi et al (2013)

Perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan emisi perusahaan tersebut menjadi tiga kategori yaitu lingkup (*scope*) 1-3. Lingkup 1-2 yang dilaporkan, sedangkan lingkup 3 merupakan pilihan (Choi et al.,2013). Konsep “Ruang

Lingkup/ *Scope*” yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sumber emisi karbon dan untuk membantu akuntansi dan pelaporan. Istilah lingkup 1, lingkup 2 dan lingkup 3 telah diterima secara luas dan telah digunakan pada sejumlah program dan standar (*The Institute of Chartered Accountants in Australia*, 2008). Tabel 2.3 berikut adalah deskripsi dari lingkup (*scope*) 1,2, dan 3.

Tabel 2.3

Deskripsi Ruang Lingkup 1,2, dan 3

Lingkup 1	Emisi GRK langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Emisi GRK terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, misalnya: emisi dari pembakaran boiler, tungku, kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan; emisi dari produksi kimia pada peralatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan. • Emisi CO₂ langsung dari pembakaran biomassa tidak dimasukkan dalam lingkup 1 tetapi dilaporkan secara terpisah. • Emisi GRK yang tidak terdapat pada protocol Kyoto, misalnya CFC, NOX, dll sebaiknya tidak dimasukkan dalam lingkup 1 tetapi dilaporkan secara terpisah.
Lingkup 2	Emisi GRK secara tidak langsung yang berasal dari listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup emisi GRK dari pembangkit listrik yang dibeli atau dikonsumsi oleh perusahaan. • Lingkup 2 secara fisik terjadi pada fasilitas dimana listrik dihasilkan.

Lingkup 3	Emisi GRK tidak langsung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup 3 adalah kategori pelaporan opsional yang memungkinkan untuk perlakuan semua emisi tidak langsung lainnya. • Lingkup 3 adalah konsekuensi dari kegiatan perusahaan, tetapi terjadi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan • Contoh lingkup 3 adalah kegiatan ekstraksi dan produksi bahan baku yang dibeli, transportasi dari bahan bakar yang dibeli, dan penggunaan produk dan jasa yang dijual.
-----------	----------------------------------	---

Sumber: Choi et al (2013)

Metode pengukuran yang digunakan adalah *content analysis*. Metode ini dilakukan dengan cara membaca laporan tahunan dan *sustainability report* perusahaan-perusahaan sampel untuk menemukan sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon. Luas item pengungkapan emisi karbon menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Choi et al., (2013) yang terkonstruksi dari *request sheet* yang dikembangkan CDP (*Carbon Disclosure Project*). Jika perusahaan melakukan pengungkapan item sesuai dengan yang ditentukan maka akan diberi skor 1, sedangkan jika item yang ditentukan tidak diungkapkan akan diberi skor 0. Kemudian skor 1 dijumlahkan secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah maksimal item yang dapat diungkapkan lalu dikali 100%.

Dengan demikian, berikut adalah formula pengungkapan emisi karbon yang dikembangkan dalam penelitian ini :

$$CED = (\sum di / M) \times 100\%$$

Keterangan:

CED = Pengungkapan emisi karbon / *carbon emission disclosure*

$\sum di$ = Total keseluruhan skor 1 yang didapat perusahaan

M = Total item maksimal yang dapat diungkapkan (18 item)

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure* yaitu:

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Jannah dan Muid (2014)	Pengaruh <i>Media Exposure</i> , Tipe Industri, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan Kinerja Lingkungan terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	<i>Media Exposure</i> , tipe industri, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> mempengaruhi <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Kinerja Lingkungan tidak mempengaruhi <i>Carbon Emission Disclosure</i> .
2	Linggasari dan Chariri (2015)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Tipe Industri, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, <i>Media Exposure</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	<i>Leverage</i> , tipe industri, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Sedangkan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan <i>media exposure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
3	Bayu Tri Cahya (2016)	Pengaruh <i>Media Exposure</i> , Kinerja Lingkungan, Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2012-2014	Jenis industri berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> , sedangkan kinerja lingkungan, paparan media, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i>
4	Irwhantoko Basuki (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kompetensi, Pertumbuhan, Rasio Utang pada Ekuitas, Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Ukuran perusahaan, profitabilitas, kompetensi, reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Pertumbuhan dan rasio utang pada ekuitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
5	Putri Citra Pratiwi dan Vita Fitria Sari (2016)	Pengaruh Tipe Industri, <i>Media Exposure</i> , dan Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Tipe industri berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan profitabilitas dan <i>media exposure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .
6	Desy Nur Pratiwi (2017)	Regulator, Kepemilikan Institusional, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i>	Secara parsial regulator dan kepemilikan institusional mempengaruhi <i>carbon emission disclosure</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Secara simultan regulator, kepemilikan institusional, <i>leverage</i> mempengaruhi <i>carbon emission disclosure</i> .

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Regulator terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Regulator (pemerintah) merupakan faktor pendorong utama bagi perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan. Pemerintah juga termasuk salah satu *stakeholder* yang mempunyai kewenangan yang besar untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan melakukan pengungkapan karbon. Pemerintah yang sadar akan permasalahan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, maka cenderung menekan perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan (Nur Pratiwi, 2017).

Hasil penelitian Nur Pratiwi (2017) bahwa:

“Regulator mempunyai pengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure* karena pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menekan perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan. pemerintah juga sudah sejak tahun 2004 membuat undang-undang tentang pengurangan emisi karbon.”

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi-institusi tertentu seperti seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Susanti & Mildawati, 2014). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas

ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Hasil penelitian Ghomi dan Leung (2013) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang cukup tinggi, akan berada di bawah tekanan dari *stakeholder* atau pemegang sahamnya tersebut, sehingga dalam hubungannya dengan pengungkapan, perusahaan akan mengungkapkan laporan tambahan yang bersifat sukarela tersebut sesuai dengan arah dari *stakeholder* sesuai dengan teori *stakeholder*.”

Menurut hasil penelitian Pratiwi (2017) bahwa:

“Kepemilikan institusi yang besar mempunyai pengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure* karena pemegang saham mayoritas mampu mengendalikan perusahaan dibanding pemegang saham mayoritas. Hal ini sejalan dengan Cotter dan Najah (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan perubahan iklim.”

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan dilihat dari total aset, tingkat penjualan, maupun nilai pasar saham. Skala perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

Menurut Wang et al., (2013) Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan besar sosial dan politik daripada perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik tersebut digunakan oleh

perusahaan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada.

Galani et al., (2011) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar biaya produksi informasi (mengumpulkan dan menghasilkan informasi) bagi pengguna laporan tahunan. Perusahaan-perusahaan besar mempublikasikan informasi lebih lanjut dalam laporan mereka untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pengguna yang berbeda. Perusahaan yang lebih besar cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih dari perusahaan kecil dalam laporan tahunan mereka karena keunggulan biaya kompetitif mereka. Oleh karena itu, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap publikasi informasi berkelanjutan.”

Menurut Luo et al., (2013) bahwa:

“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Para *stakeholder* mempunyai ekspektasi yang tinggi mengenai praktik manajemen karbon. Untuk menjawab tekanan tersebut cara yang dapat ditempuh perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan sosial lingkungan agar mendapatkan dukungan dari para *stakeholder* dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.”

Menurut Jannah dan Muid (2014) bahwa:

“Ukuran perusahaan mempunyai hubungan yang positif dengan pengungkapan emisi karbon, pengungkapan GRK. Perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengungkapan karbon sukarela.”

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih baik mungkin mengungkapkan informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas

perusahaan mereka. Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan CO₂.

Profitabilitas seringkali dijadikan tolak ukur dalam melakukan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan lingkungan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah sehingga memudahkan perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Zhang, et al., 2013).

Lorenzo et al., (2009) menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi nilai ROA (*Return On Asset*) mengindikasikan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam memasukkan strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya.”

Menurut Luo et al., (2013) bahwa:

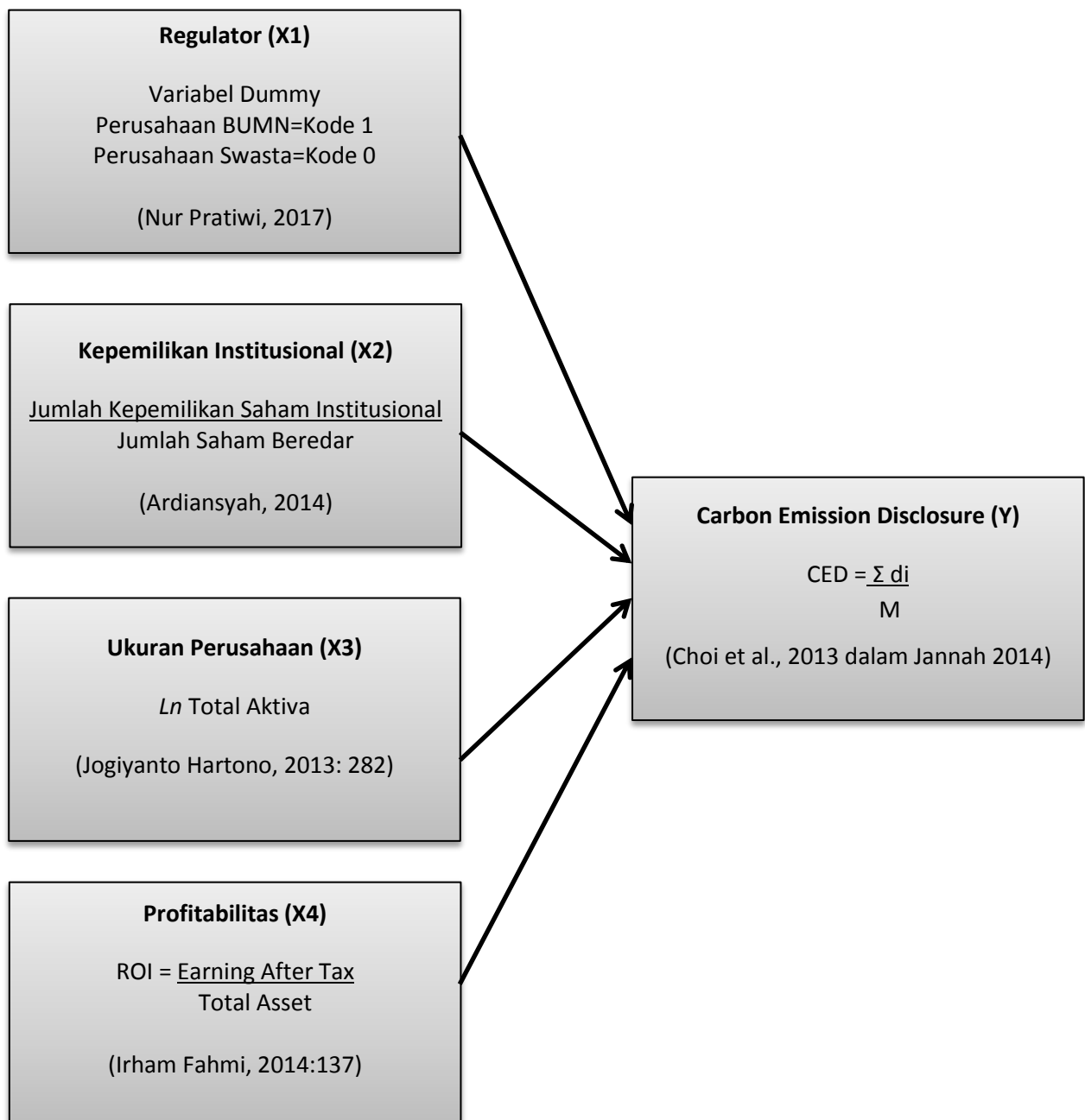
“Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon. Hasil penelitian menemukan hubungan yang positif antara profitabilitas dengan pengungkapan emisi karbon.”

Choi et al., (2013) menyatakan bahwa:

“Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mengungkapkan informasi mendapatkan sinyal bahwa mereka dapat

bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat.”

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Regulator, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure*.” maka model kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Kata Hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Sugiyono (2013:64) berpendapat bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan Regulator, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas sebagai variabel independen serta *Carbon Emission Disclosure* sebagai variabel dependen. Berikut hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

- H₁ : Terdapat Pengaruh Regulator terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H₂ : Terdapat Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H₃ : Terdapat Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H₄ : Terdapat Pengaruh Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H₅ : Terdapat Pengaruh Regulator, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Carbon Emission Disclosure*.